



Haryadi: Tidak Ada Pejabat Terlibat

Wali Kota Minta Kasus Jual Beli Kios Diusut Tuntas

YOGYA. TRIBUN - Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti memastikan tidak ada pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terlibat dalam kasus jual beli kios lapak di parkir Abu Bakar Ali (ABA). Wali Kota meminta agar kasus ini bisa diselesaikan secara tuntas.

Haryadi menjelaskan, penunjukan ketua Koperasi Malioboro-Abu Bakar Ali (Komaba) merupakan pengajuan dari Dinas Pariwisata (Dinpar) Kota Yogyakarta. "Itu pengajuan dari Dinpar aja. Dia kan mengatasnamakan sebagai Komaba. Penunjukan tidak kepada dia, tapi kepada Komaba," katanya saat dihubungi, Jumat (6/8).

Haryadi juga menegaskan tidak ada pejabat yang kongkalikong dengan tersangka ES yang kini dijerat UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ES diduga bersalah oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Yogyakarta karena diduga telah menjual sejumlah lapak kios parkir ABA untuk keuntungan pribadi.

Padahal semestinya lapak kios tersebut hanya bolehkan untuk disewa dengan penarikan retribusi dari pedagang setiap bulannya. "Kalau parkir ABA itu kan koperasi. Pengelola bukan milik Pemkot. Sebagai koperasi itu ya pengelolaanya koperasi," tegas dia.

Haryadi turut menyesalkan lantaran ES merasa memiliki aset tersebut kemudian menjual lapak kios itu demi keuntungan sendiri. "Kalau pengelola itu kan mengelola, bukan memiliki, bukan menjual. Nah, itu kan kasihan orang-orang ditipu," tegas Haryadi. Dia meminta supaya pihak Kejari Kota Yogyakarta menyelesaikan kasus tersebut secara tuntas.

"Proses hukum terus lanjut dong. Hormati proses hukum, lanjutkan saja," ungkapnya.

Beruntung

Salah satu pemilik lapak kios parkir ABA, Yulia, mengaku cukup beruntung lantaran tidak menjadi korban penipuan jual beli yang dilakukan ES. Pengakuan Yulia, ia tidak sempat ditawari oleh ES untuk membeli lapak kios

PROSES HUKUM BERLANJUT

- Wali Kota pastikan tidak ada pejabat Pemkot terlibat kasus jual beli kios di parkir ABA.
- Penunjukan ketua Komaba merupakan pengajuan dari Dinpar Kota Yogyakarta.
- Kejari Kota Yogyakarta diminta menyelesaikan kasus tersebut secara tuntas.

di parkir ABA tersebut.

"Saya gak pernah ditawari, karena saya sebelum parkir itu dibangun sudah ada lapak di parkir ABA. Dulu masih banyak pohon," ungkap Yulia.

Sepengetahuannya, yang membeli lapak bodong dari ES kebanyakan dari luar daerah Yogyakarta. "Ada yang membeli orang-orang luar Jogja. Saya gak tahu, kabarnya kan sekarang bermasalah," imbuh Yulia.

Ia juga mengaku selama 30 tahun berjualan di parkir ABA dirinya rutin membayar retribusi kepada pemerintah Kota Yogyakarta dan Komaba dengan kepengurusan yang baru. "Saya bayar retribusi sekarang. Ya per bulan gak sampai Rp200 ribu. Gak per-

nah saya ikut jual beli kayak gitu. Ya karena saya sudah ada lapak," tuturnya.

Kasi Pidana Khusus (Kasi-pidus) Kejari Kota Yogyakarta, Lilik Andriyanto, menjelaskan, pihak Kejari Yogyakarta pun belum mengindikasikan adanya tersangka dari kalangan pejabat Pemkot Yogyakarta. "Sementara ini belum. Kalau saksi yang sudah kami periksa ada 40 orang. Itu dari kalangan pedagang dan pejabat pemerintah," paparnya.

Selain dijerat dengan UU TPPU dan Tipikor, ES kini juga masuk putusan pidana kasus penggelapan atau penipuan karena melanggar pasal 372 KUHP. "Posisi tersangka sekarang juga sedang ditahan karena kasus penipuan 372," pungkasnya. (hda)

Yogyakarta,
Kepala



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005